

SOSIALISASI "E-GOVERNMENT, PEMERINTAHAN DESA BERBASIS WEBSITE (IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA) DI DESA TOMPO KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU"

Oleh:

Dr. Mukmin Muhammad, S.Sos., MH
NIDN. 0910037502

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M) STIA AL GAZALI BARRU TAHUN 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. ANALISIS SITUASI	1
B. RUMUSAN MASALAH MITRA	7
C. SOLUSI YANG DITAWARKAN	7
BAB II. TARGET DAN LUARAN	8
BAB III. PELAKSANAAN/ GAMBARAN IPTEK	9
A. MATERI SOSIALISASI/TERLAMPIR	9
B. DOKUMENTASI KEGIATAN PKM	9
REFERENSI	13
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Sosialisasi "E-Government, Pemerintahan Desa Berbasis Website (Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Di Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru". Mukmin Muhammad

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Istilah e-Government berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, dan di antara instansi pemerintah itu sendiri baik antara eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Semua hal tersebut dengan bantuan teknologi internet yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pada ayat satu (1) pasal 86 dapat terjabar bahwa desa mempunyai hak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang berkembang oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaannya bisa menggunakan APBN, APBD, ataupun APBDes tergantung dengan kondisi yang ada pada daerah tersebut. Adapun penjabaran dari ayat lima (5) pasal 86 bahwa sistem informasi Desa yang berkembang oleh pemerintah kabupaten, kemudian terkelola oleh desa dan dapat terakses oleh seluruh masyarakat dan pemangku kebijakan. **Target luaran** dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini sebagai berikut: (i) Dengan pemerintahan desa berbasis website maka aparatur pemerintahan dapat dengan mudah memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat yang efektif dan efesien, (ii) Melalui layanan itu, masyarakat dengan mudah untuk memperoleh informasi dan mendapatkan layanan secara cepat,"

(iii) Pemerintah Desa dapat mengetahui aturan hukum terkait pelaksanaan Sistem informasi desa yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kata Kunci: pemerintahan, e-government, desa, undang-undang



BABI

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Istilah e-Government berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, dan di antara instansi pemerintah itu sendiri baik antara eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Semua hal tersebut dengan bantuan teknologi internet yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Dengan memanfaatkan koneksi internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat dimana diharapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan registrasi perizinan, memantau proses penyelesaian, melakukan secara langsung untuk setiap perizinan dan layanan publik lainnya. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang lebih besar secara cepat dan akurat.

Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan, sehingga pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa masyarakat ke dalam jurang *digital divide*, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi.

Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi





birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Oleh karena itu penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong masyarakat menuju masyarakat informasi. Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif pemerintah harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas diseluruh wilayah, yang dapat diandalkan dan terpercaya serta mudah dijangkau secara interaktif. Pada dasarnya, setiap pembaruan dan perubahan yang dilakukan pemerintah dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*). Transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan dan informasinya dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Menyadari betapa pentingnya arti mewujudkan kepemerintahan yang baik, maka pemerintah dituntut harus mampu meningkatkan kinerja. Sasaran yang menjadi prioritas adalah mewujudkan pelayanan masyarakat yang efisien dan berkualitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan perhatian pemerintah untuk melakukan perubahan secara bertahap melalui manajemen perubahan menuju kearah penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah mempercepat proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi di bidang administrasi perkantoran, modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakekatnya tujuan tata kepemerintahan yang baik atau sering disebut *Good Governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan/pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta).

Sebuah pemikiran tentang tata kepemerintahan yang baik menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar, dan masyarakat. Semua pelaku harus saling





mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya serta membuka ruang dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan diantara mereka. Melalui proses tersebut diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi dalam penerapan program-program tata kepemerintahan yang baik di masyarakat. Sinergi yang ingin dilakukan pemerintah itu bisa diterapkan dengan memanfaatkan sistem *e-Government* yang merupakan salah satu aplikasi dari teknologi informasi. Namun demikian saat ini masalah utama yang dihadapi dalam implementasi *Good Governance* adalah:

- Terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi informasi untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada masyarakat, agar proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Pelayanan melalui situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajeman dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah.
- Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government pada masing-masing instansi. (*Abdul Mughni*).

1. Pentingnya Sistem Informasi Desa (Sid) Dalam Membangun Desa

Selanjutnya dalam Sistem Informasi desa didapatkan platform tata Kelola Desa berbasis website, dan menawarkan sejumlah layanan seperti sistem informasi profil Desa, pembangunan Desa, administrasi, kependudukan, pelayanan publik, Posyandu, laporan APBDes dan berbagai layanan lainnya. Selain adanya sistem, Pemerintah desa juga berwenang menggunakan Aplikasi pelayanan desa, keterangan fitur antara lain adalah sebagai berikut:

 Fitur Administrasi Desa ialah Sebuah aplikasi desa yang dapat berguna secara mandiri oleh perangkat desa. Sangat bermanfaat untuk mendukung fungsi dan tugas kantor desa, termasuk administrasi kependudukan, pengelolaan anggaran, dan lain sebagainya.





- Fitur Pelayanan desa ialah Aplikasi desa online yang dapat berguna secara mandiri oleh masyarakat. Mempermudah masyarakat dalam pelayanan administrasi, baik administrasi kependudukan, nikah, keterangan tidak mampu, dan lain sebagainya.
- Fitur Bansos ialah layanan khusus untuk menyimpan dan mengolah data penerima bantuan sosial dari pemerintah.
- Presensi Digital adalah sebuah aplikasi berbasis android yang terintegrasi dengan SID.
 Berfungsi untuk memudahkan para Pemerintah Desa dalam mendapatkan pelaporan presensi, karena data perangkat desa bisa otomatis tersinkronisasi dengan Presensi Digital
- Website profile adalah milik halaman website yang memuat profil website desa, produk andalah desa, serta beberapa destinasi wisata di desa.
- Android App ialah layanan tanpa batas yang dapat berguna oleh warga dengan aplikasi android yang memuat berita, marketplace dan permintaan surat eksklusif untuk warga Desa.

Beberapa Desa pengguna Teknologi Panda yang sudah menerapkan Sistem Informasi Desa ini adalah Desa Taman. Taman adalah salah satu Desa yang ada di Kabupaten Sampang Madura, dengan penggunaan sistem informasi desa yang terintegrasi langsung dengan website Desa, Pemdes Taman menyediakan anjungan layanan online. Anjungan layanan online ini bisa secara langsung terakses pada kantor Desa maupun lewat smartphone. Layanan online ini memiliki fungsi oleh para warga untuk mengajukan berbagai surat dan tidak butuh waktu lama cukup 5 menit surat bisa langsung ada.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Sistem Informasi Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia





menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Pemerintah desa dengan masyarakatnya lewat sistem yang berbasis internet yang sangat dikenal dengan istilah Sistem Informasi Desa (SID). Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah aplikasi website yang didalamnya memuat tentang informasi data penduduk, layanan publik, produk hukum, dan informasi tentang kegiatan dan program desa yang dikelola oleh pemerintah desa untuk mendukung perkembangan desa menuju desa maju dan mandiri.

Dalam Undang-Undang desa bagian ketiga tentang sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yaitu pasal 86 disebutkan bahwa:

- 1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Health care professionals should provide information, explicitly on how to use the https://clickmiamibeach.com/ Internet for health-related information.
- 3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- 4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.





- 5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Kemudian sumber lain pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pada ayat satu (1) pasal 86 dapat terjabar bahwa desa mempunyai hak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang berkembang oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaannya bisa menggunakan APBN, APBD, ataupun APBDes tergantung dengan kondisi yang ada pada daerah tersebut. Adapun penjabaran dari ayat lima (5) pasal 86 bahwa sistem informasi Desa yang berkembang oleh pemerintah kabupaten, kemudian terkelola oleh desa dan dapat terakses oleh seluruh masyarakat dan pemangku kebijakan. Dari pengertian tersebut, maka dapat kita pahami bahwa Sistem Informasi Desa ada sebagai alat informasi untuk pelayanan pada kantor desa. Fungsinya antara lain sebagai informasi administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, inventaris aset kantor desa, inventarisasi sarana prasarana pada desa, pengelolaan anggaran desa, layanan publik, dan lain sebagainya. Adapun beberapa contoh sistem Informasi Desa yang dapat terakses oleh masyarakat ialah:

- 1. Website desa warga dapat dengan mudah melihat perkembangan desa melalui data atau informasi yang tampil pada website Desa.
- 2. Adanya layanan Administrasi persuratan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan dengan online tanpa perlu mengurus ke kantor Desa.
- Adanya sistem sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dan pembangunan Kawasan perdesaan antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah memberikan masukan terkait pembaharuan data, konten dan informasi desa secara terus menerus.





B. Rumusan Masalah Mitra

Berdasarkan Hasil identifikasi Permasalahan dari pelayanan publik di Kasntor desa yang ada di Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :

- Hingga saat ini seluruh pelayanan di Kantor desa masih dilakukan secara manual yaitu pemohon pelayanan harus datang ke kecamatan, Desa & Kelurahan untuk mendapatkan pelayanan.
- 2. Jenjang dan jenis pelayanan memiliki sturuktur birokrasi yang panjang, dan berbelit. Akibatnya, urusan di lembaga penyedia layanan publik menjadi berbelit-belitnya dan membutuhkan waktu yang lebih lama serta biaya tinggi. Selain itu, ketiadaan standarisasi pelayanan publik yang dapat menjadi pedoman bagi setiap aparat pemerintah khususnya di Kabupaten Barru.

C. Solusi Yang Ditawarkan

Solusi yang ditawarkan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Mitra (Pemerintah Desa dan kelurahan yang ada Kabupaten Barru) adalah sebagai berikut :

Sosialisasi E-Government, Pemerintahan Desa Berbasis Website (Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Di Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Sosialisasi itu dilaksanakan di kantor desa Tompo yang melibatkan mahasiswa KKLP STIA Al Gazali Barru Gel XXXI Tahun 2022, Staf dikantor desa Tompo dan Masyarakat setempat yang turut menghadiri acara tersebut,serta dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022. Dengan Pemerintahan Desa Berbasis Website maka aparatur pemerintahan dapat dengan mudah memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat yang efektif dan efesien. Melalui layanan itu, masyarakat dengan mudah untuk memperoleh informasi dan mendapatkan layanan secara cepat, setelah tahap sosialisasi ini akan tindaklanjuti dengan workshop untuk memantapkan program dari layanan online berbasis Softwarer tersebut.





BAB II

TARGET LUARAN

Target luaran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini sebagai berikut :

- 1. Dengan Sistem informasi desa dengan layanan publik secara online maka aparatur pemerintahan dapat dengan mudah memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat yang efektif dan efesien.
- 2. Melalui layanan itu, masyarakat dengan mudah untuk memperoleh informasi dan mendapatkan layanan secara cepat.
- Pemerintah dapat memanfaatkan peluang dari teknologi yang digunakan dalam egovernment/pelayanan online system yaitu teknologi informasi dan komunikasi, mengingat kelak masyarakat memiliki alternatif dalam mengakses pelayanan publik secara modern.
- 4. Pemerintah dapat memanfaatkan peluang dari teknologi yang digunakan dalam egovernment (Sistem Informasdi Desa) dengan Dukungan Teknologi Informasi menuju ke era digital (era revolusi industri 4.0)





BAB III PELAKSANAAN

GAMBARAN PELAKSANAAN IPTEK

A. Materi Sosialisasi

TERLAMPIR

B. Dokumentasi Kegiatan Pkm

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi E-Government, Pemerintahan Desa Berbasis Website (Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa) Di Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal, 12 September 2022, bertempat di di Kantor desa Tompo, Kecamatan Barru Kabupaten Barru:



Gambar 1. Tema Kegiatan





PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi



Gambar 3. Penyampaian Materi Sosialisasi







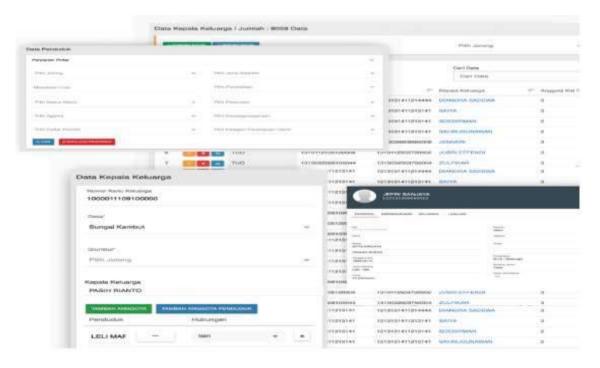
Gambar 4. Penyerahan Sertifikat Sebagai Pemateri Sosialisasi Oleh Kepala Desa Tompo



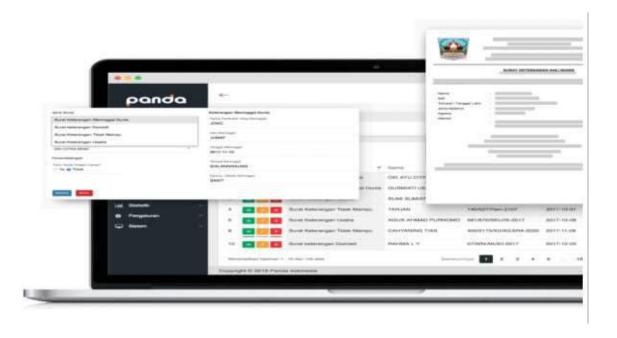
Gambar 5. Peserta Sosialisasi







Gambar 6. Tampilan E-Government (Sistem Informasi Desa)



Gambar 7. Tampilan Sistem Informasi Desa



DAFTAR PUSTAKA

Meraja SEV, 2018, https://www.merajasev.id/, [diakses tanggal 9 Desember 2018]

Mukmin Muhammad, 2018, Sistem Informasi desa (Materi Sosialisai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat), P3M STIA AL Gazali Barru, http://bit.ly/sidesa2018, [diakses tanggal 28 July 2018]

MukminMuhammad, 2018, Merajamedia, https://merajamedia/sitemagic/index.php [diakses tanggal 10 Agustus 2018]

Ranggaoni Jahja et al, 2012, Sistem Informasi Desa (sistem informasi dan data desa), Combine Resource Institution, Yogyakarta.

Ranggoaini Jahja et al, 2014, *Buku pintar sistem administrasi & informasi desa*, Forum pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.

Sid Meraja SEV. 2018, http://sid.merajasev.id/, [diakse tanggal 12 Desember 2018]

Thorne, Steve, 2007, Community Based Technology Solutions: Adapting to Climate Change. Booklet yang dipublikasikan oleh South South North (SSN).:

http://www.preventionweb.net/english/professional/trainings-events/edu-

materials/v.php?id=9545, [Diakses tanggal 7 Oktober 2018]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.



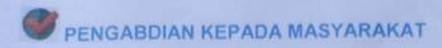
LAMPIRAN - LAMPIRAN

1.SURAT TUGAS

2.DAFTAR HADIR

3.SURAT KETERANGAN

4.SERTIFIKAT PEMATERI





PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M) STIA AL GAZALI BARRU

Jl. Jend. Sudirman No. 41 Barru Sulawesi Selatan 90712 Telp. (0427) 21871 Fax. (0427) 21131 email: lp3m@algazali.ac.id

PENGESAHAN PENGABDIAN DOSEN

Nama : Dr. Mukmin Muhammad, S.Sos., MH.

NIDN : 0910037502

Pekerjaan Dosen Tetap STIA Al Gazali Barru

Judul Sosialisasi "E-Government, Pemerintahan Desa Berbasis Website

(Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Di Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru"

Luaran Pengabdian:

a. Publikasi ilmiah

b. Pengembangan iptek-sosbud

c. Pengayaan bahan ajar

Ketua STIA Al Gazali Barru

Breek Kymhraddin Hasan, M.Pd

Barru, 15 September 2022 Kenn P3M

Nurlia/S.Sos., M.Si.



PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M) STIA AL GAZALI BARRU

Jl. Jend. Sudirman No. 41 Barru Sulawesi Selatan 90712 Telp. (0427) 21871 Fax. (0427) 21131 email. lp3m@algazali.ac.id.

SURAT TUGAS

Nomor: 44C/P3M/PM/STIA-AG/BR/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Nurlia, S.Sos., M.Si

NIDN

: 0927106801

Jabatan

: Ketua P3M STIA Al Gazali Barru

Memberikan tugas kepada:

Nama

: Dr. Mukmin Muhammad, S.Sos., M.H.

NIDN

: 0910037502

Pekerjaan

: Dosen Tetap STIA Al Gazali Barru

Sebagai Pemateri dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat "Sosialisasi E-Government Pemerintahan Desa Berbasis Website (Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa) di Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru" yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 bertempat di Kantor Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 9 September 2022

Nurlin, S.Sos., M.Si



KULIAH KERJA NYATA GELOMBANG XXXI TAHUN AKADEMIK 2021/2022 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AL GAZALI BARRU

Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Kode Pos 90711 Sekretariat: Posko KKN STIA Al Gazali Barru Desa Tompo

Nomor Lampiran : 002/KKN-31/STIA AL GAZALI BARRU/IX/2022

Perihal

: Permintaan Pemateri Sosialisasi

Kepada Yth,

Bapak Dr. Mukmin Muhammad, S.Sos., MH.

Tempat

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah Nya serta meridhoi segala aktivitas kita. Aamiin. Dalam rangka pelaksanaan program kerja yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) STIA Al Gazali Barru Gelombang XXXI tahun akademik 2021/2022 Desa Tompo, Kecamatan Barru, dengan hormat kami mengharapkan kepada Bapak Dr. Mukmin Muhammad, S.Sos., MH. untuk mengisi kegiatan "Sosialisasi E-government, Pemerintahan Desa Berbasis Website" yang Insya Allah akan dilakukan pada :

Hari/Tanggal : Senin/12 September 2022 Waktu : 09.00 WITA - Selesai

: Baruga "Samaturue" Desa Tompo Tempat

Maka kami memohon kepada Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk hadir dalam acara tersebut. Atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barru, 09 September 2022

Mahasiswa KKN Gelombang XXXI STIA AL GAZALI BARRU Desa Tompo Kecamatan Barru, Kab. Barru 2022

Koordinator Desa.

Sekretaris.

NIM. 20191051

MUH. ILHAM ANUGRAH NIM.20191065

Mengetahui, Kepala Desa Tompo. DES

WHARDL B

OMF



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU KECAMATAN BARRU DESA TOMPO

SURAT KETERANGAN

Nomor: 145/465/DT/BR/IX/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHARDI B.

Jabatan : Kepala Desa Tompo

Alamat : Dusun Tompo Desa Tompo

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Dr. Mukmin Muhammad, S.Sos., MH

NIM : 0910037502

Pekerjaan : Dosen Tetap STIA AL GAZALI BARRU

Alamat : Jl. Muh. Halim Lingkungan Palanro Kelurahan Lalolang

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

Adalah benar telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi E-Government Berbasis Website (Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa) & Sosialisasi Kewirausahaan Berbasis Website" yang dilaksanakan pada hari Senin, 12 September 2022 bertempat di Aula Kantor Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

Demikian surat keterangan ini diberikanuntuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Tompo

SUHARDI B



KULIAH KERJA NYATA (KKN) GELOMBANG XXXI TAHUN AKADEMIK 2021/2022 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AL GAZALI BARRU

Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Kode Pos 90711 Sekretariat: Posko KKN STIA Al Gazali Barru Desa Tompo

DAFTAR HADIR SOSIALISASLE-GOVERNMENT, PEMERINTAHAN DESA BERBASIS WEBSITE & SOSIALISASI KEWIRAUSAHAAN BERBASIS WEBSTIE

Hari/Tanggal : Senin, 12:September 2022 Waktu : 09:00 WITA - Selesai

Tempat : Baruga "Samaturue" Desa Tompo

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ACHTHO MAMARONI	Post-0 9	1 (1)
2	ASNADI	P. MALLINGO	264-
3	Kansapa	P. mo(GMPO	3 Vice
4	A. Halmish	P. wallingo	1 4 Aquel
5	H. MARZUKE	BARANG	5 Jun
6	Ripylah Remadani	P Mallimpe	64113+
7	Honapi Bagai P	asotorp	7/4
8	SASA	Deca 7 ompo	8 87
9	April	Osa Tampo	9 April /
10	Llaguan	TOMPO	10 /
11	NADA WILDAMA .	Batuloppo	11
12	JAHRIA	Barans	12 ///
13	NULWATI	TOMPO	13 Opt.
14	ASP-IAN1	Bahycappe	14 Aai
15	HJ.STI KHADUAH, J. Sus	t- mallimpo	15 Coffee
16	SUDIERNAM	-u-	16000
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21



Sertifikat



Diberikan Kepada

Dr. Mukmin Muhammad, S.Sos., MH.

Sebagai pemateri pada kegiatan "Sosialisasi E-government, Pemerintahan Desa Berbasis Website", yang dilaksanakan pada hari, Senin 12 September 2022 bertempat di Baruga Samaturue Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN GELOMBANG XXXI STIA AL GAZALI BARRU

Tompo, 11 September 2022

Koordinator Desa

FADLAN

Kepala Desa Tompo

SUHARDI. B



2022





by Mukmin Muhammad







Qlue

Aplikasi Qlue merupakan aplikasi yang tidak asing lagi bagi warga Jakarta, aplikasi ini terhubung langsung dengan Jakarta Smart City (JSC) yang berperan menyampaikan aduan itu kepada Pemprov. Masyarakat bisa melaporkan kejadian yang ada di sekitarnya. Terintegrasi dengan JSC, dan pemerintah bisa menjawab bahkan mengatasi permasalahan yang dilaporkan. Dengan begitu, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, dan pemerintah pun dapat mengetahui hal-hal yang menjadi keresahan warganya.

Digital Government Service (DGS) kesehatan

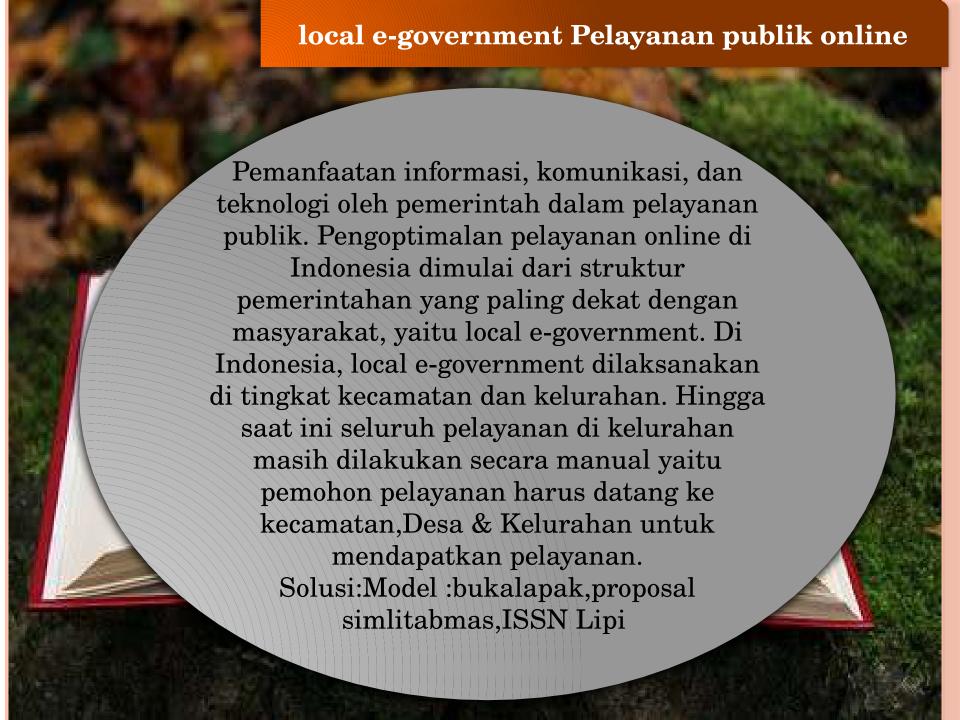
Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Bantul, Yogyakarta, meluncurkan *Digital Govern ment Service* (DGS) kesehatan. DGS merupakan aplikasi untuk mempermudah layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, seperti tak perlu

lagi mengantre dan menunggu lama di puskesmas untuk mendapat rujukan ke rumah sakit. Selain bermanfaat bagi masyarakat, DGS kesehatan ini juga berguna bagi dinas kesehatan untuk memantau kinerja puskesmas-puskesmas yang ada.

Lapor Hendi

Lapor Hendi menjadi sarana penghubung bagi warga Kota Semarang untuk menyampaikan aduan, keluhan atau kritik terkait Kota Semarang kepada wali kotanya, Hendrar Prihadi (Hendi). Sistem Lapor Hendi ini berbentuk pengaduan masyarakat yang berbasis media sosial dan SMS. Beberapa di antaranya adalah melalui SMS dengan ketik format "laporhendi (spasi) *aduan*" kirim ke 1708, kemudian cuitan di Twitter dengan tagar #LaporHendi dan mention di akunInstagram, @hendrarprihadi.

Pada dasarnya e-Government mencakup e-Budgeting, e-Procurement, e-Audit, e-Catalog, e-Payment, e-Controlling, bahkan e-Health. Intinya, ini adalah konsep di mana segala urusan birokratis bisa berjalan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan level kepuasan masyarakat dan memperbaiki kinerja pemerintah.



Contoh Aplikasi E-Government di Desa













Pelayanan Publik-online dgn SID

Aplikasi Teknologi Sistem Informasi Desa tentunya berhubungan dengan data-data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berisi tentang data Nomor Induk Kependudukan - NIK dan Nomor Kepala Keluarga. Jadi Sistem Informasi untuk Desa adalah sistem yang mengawal banyak hal dalam pelayanan kependudukan salah satu aspeknya adalah keakuratan dan kecepatan dalam pelayanan publik di Desa/Kelurahan.

https://merajajournal.merajamedia.com/index.php/mrj







OpenSID

Mosdore W







DESIA SENIGGIGI JL RAYA SENGGIGI KM 10 KERANDANGAN KODEPOS 83355 KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

admin

powered by: OpenStD 18.11



Fitur OpenSid 1.Identitas Desa 2.Kependudukan 3.Statistik 4.Cetak Surat 5.Sekretariat 6.Analisis 7.Bantuan 8.Persil 9.Peta 10.Database 11.Admin web 12.Laporan/ Layanan mandiri

OpenSID Administrato OpenSID Versi 18.11 Desa Senggig1 Kec. Batulay4r Kab. Lombok Bar4t Tentang OpenSID # Home | Tentang OpenSID Anda sedang menggunakan aplikasi OpenSID 18.11 98 Aplikasi OpenSID Wilayah Dusun Penduduk Home OpenSID dikembangkan sejak Mei 2016, berlandasan Sistem Informasi Desa SID Lihat Detail 6 Lihat Detail 0 (SID) CRI. OpenSID dirancang supaya terbuka dan dapat dikembangkan bersama-sama oleh komunitas peduli SID. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di (I) Docasi https://github.com/CpenSID/opensid. 37 Me Info Desa Apakah SID ? Keluarga Rumah Tangga ✓ Statistik Manajemen Akses SiD Lihat Detail 3 Layanan Surat Tahapan Membangun SID Sekretarint Hak Cipta, Syarat, Dan Ketentuan ☑ Analisis Kelompok Kontak Dan Informasi Bantuan Lihat Detail 0 Lihat Letail 0 Pertanahan Pemelaan Activate Windows SMS SMS Anlikasi OnenSID, dikembangkan oleh Komunitas OpenSID. Versi 18.1

Pelayanan Publik-online dgn Close source-SID

Close source adalah software yang source codenya tidak dibuka untuk umum. Sang pemilik code yang close source bisa membagi source codenya melalui lisensi, entah dengan gratis maupun membayar. Meskipun gratis, lisensi tertentu bisa membuat sebuah software tidak sepenuhnya open source sehingga code pembuatan website dipegang penuh oleh pemilik program.

https://merajajournal.merajamedia.com/index.php/mrj





Meraja SEV#1



Sistem Informasi Desa

Meraja SEV#1 dikembangkan dengan Inovasi IPTEK. Serta memiliki alur kerja agar mudah dikembangkan untuk berbagai keperluan pengelolaan data kependudukan. Selain itu juga dapat dikembangkan untuk integrasi data dengan berbagai macam aplikasi yang sudah ada.

Desa sebagai penghasil data kependudukan paling

Desa sebagai penghasil data kependudukan paling utama, memiliki peranan penting terhadap keakuratan data. Meraja SEV#1 dirancang sebagai alat penjaring data kependudukan utama serta dapat mendistribusikan ulang untuk berbagai keperluan. Meraja SEV#1 memiliki fitur yang dibutuhkan untuk mengelola data administrasi, kependudukan, pelayanan publik, anggaran dan lain sebagainya.







Log In

Butuh akun Meraja Sev #1? Kontak kami

tasitae

.....

Lupa Kata Sand?

Masuk

02018 Toknologi Panda SID dikombangkun oleh PusikoMedia Indonesia Kreatif, Pelajari, Kebijakan Privasi, dan Syarat Ketemuan Luyanan

Katakan Halo ke Meraja Sev #1!

Meraja Sev #1 membantu Anda mengelola desa dengan cara mudah. Nikmati banyak kemudahan dengan bantuan teknologi Panda.

Pelajari



Activate Windows So to Settings to activate Woodan











Profil

Kependudukan

Layanan

Pemerntahan

APBDES

Statistik

Sistem

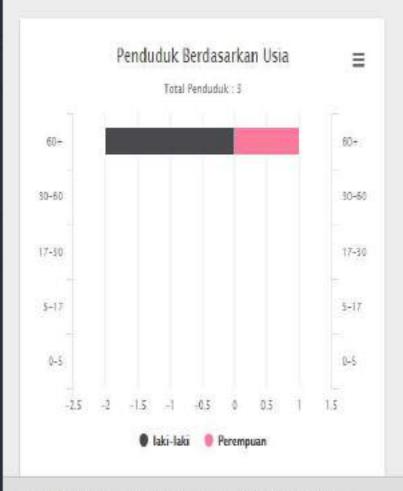
0

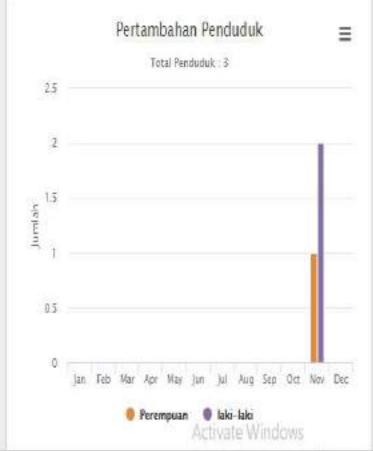


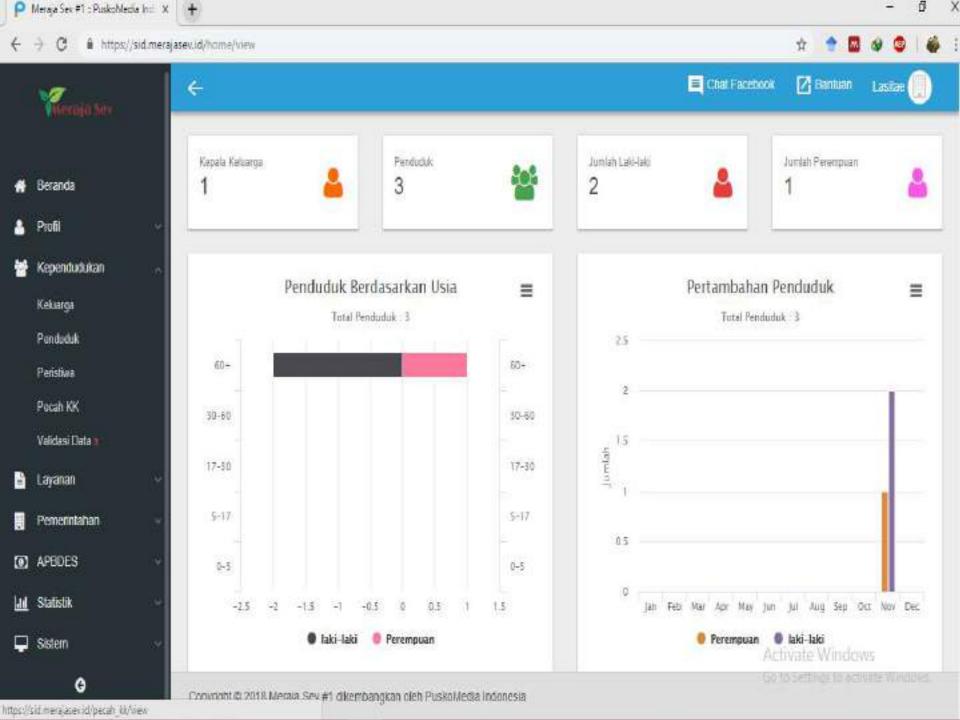






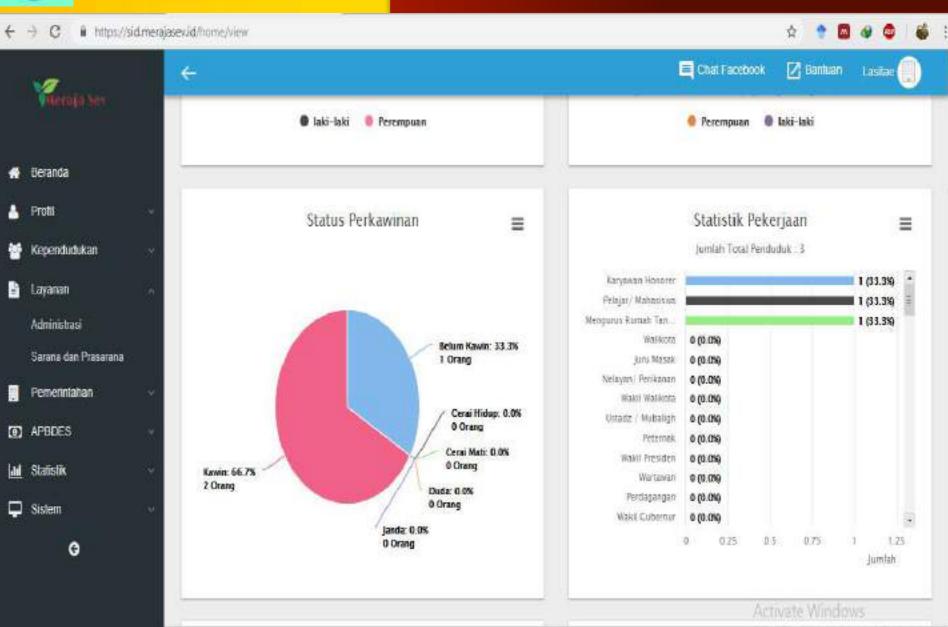




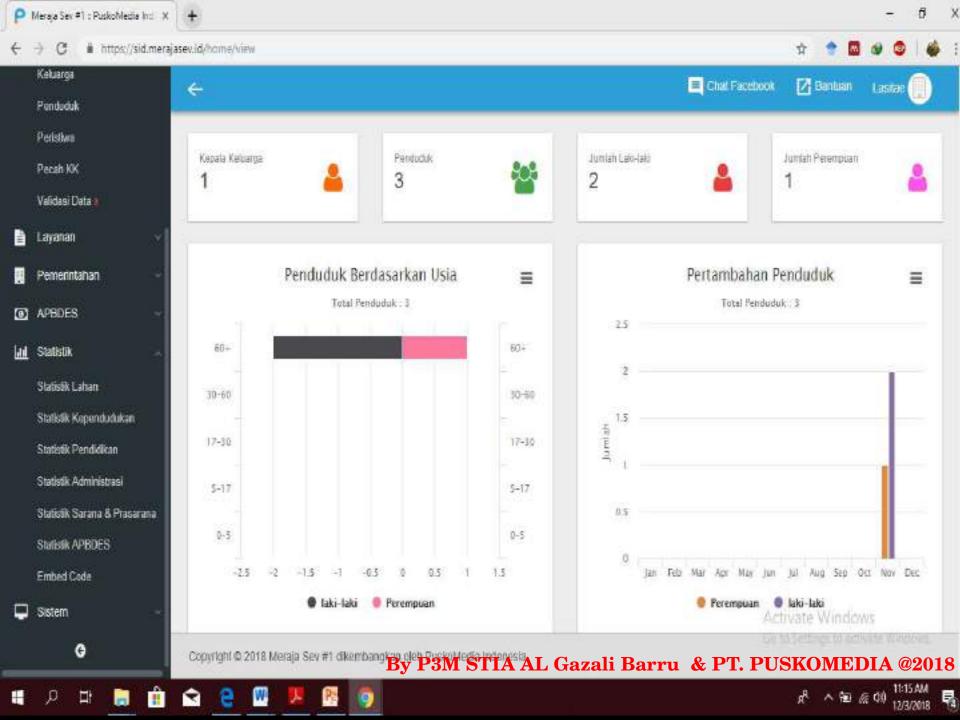




Fitur Meraja sev #1 Lebih lengkap



Copyright © 2018 Meraja Sev #1 dikembangkan oleh PuskoMedia Indonesia





Proposal Penawaran

Aplikasi Panda

Sistem Informasi Desa (SID) Terintegrasi





Fitur Aplikasi

Profil Wilayah

- Data identitas desa/kelurahan
- Data wilayah
- Data perangkat
 - Potensi

Kependudukan

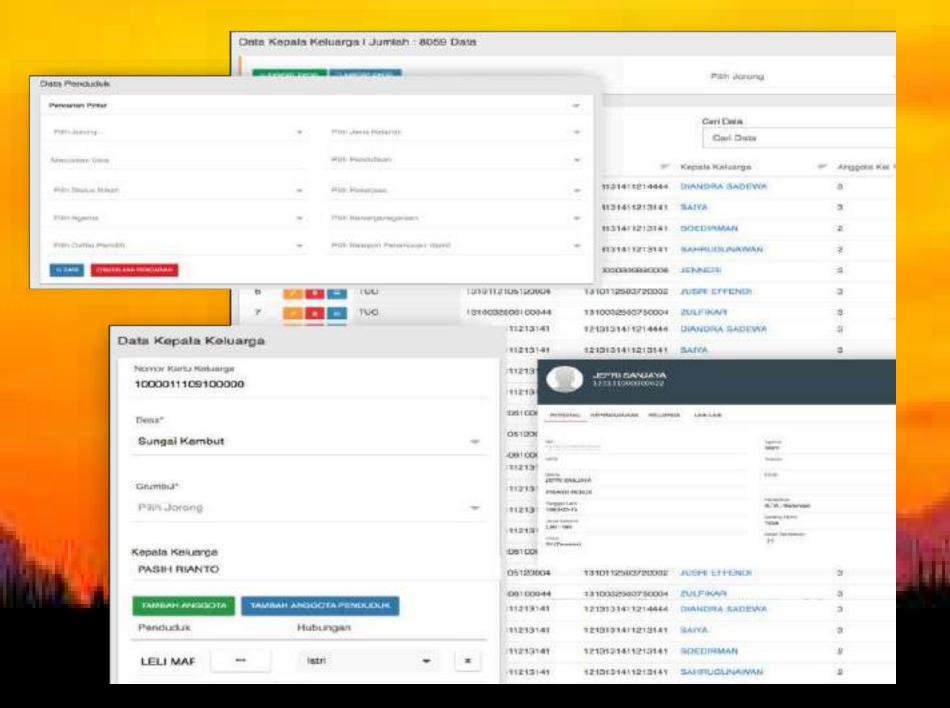
- Manajemen keluarga (data KK)
 - Manajemen penduduk/ individu
 - Data peristiwa/ kejadian
 - Pecah KK baru dan pindahan
 - Impor penduduk melalui spreadsheet
 - Dokumen Kependudukan

Validasi

- Data Kependudukan
- Pendidikan
- Usia
- DPT
- Kartu Keluarga
- Pembaruan Data

Data Terpadu

- Kelompok rentan
- DTKS (BPNT, PKH, KIS)
- Tuna Karya
- Difabilitas
- Ibu Hamil Putus Sekolah
- Buta Huruf
- Bantuan Sosial
- Kustom sesuai kebutuhan wilayah

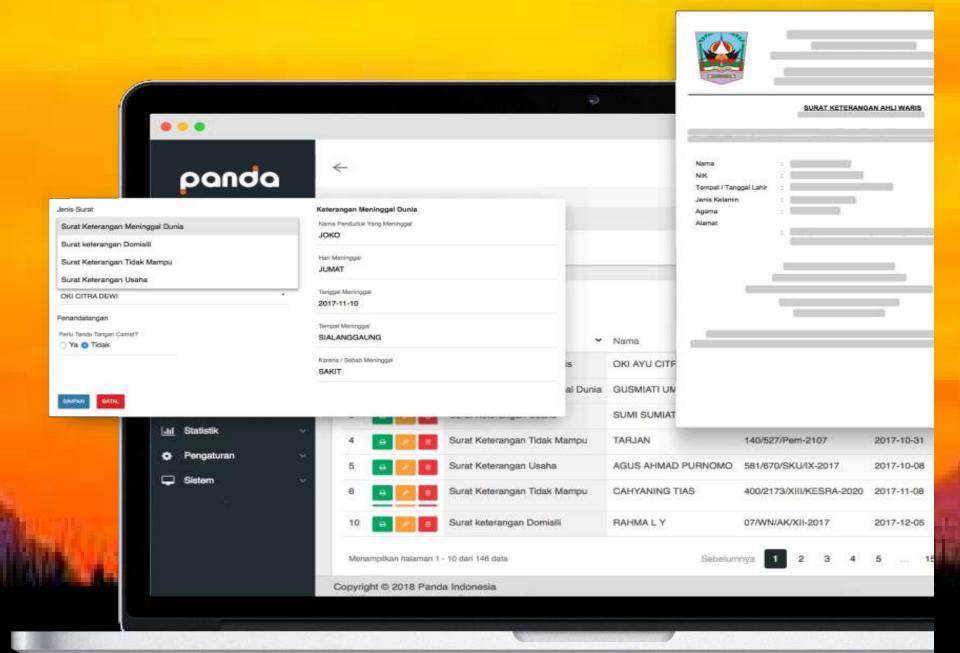


Validasi

- Data Kependudukan
- Pendidikan
- Usia
- DPT
- Kartu Keluarga
- Pembaruan Data

Data Terpadu

- Kelompok rentan
- DTKS (BPNT, PKH, KIS)
- Tuna Karya
- Difabilitas
- Ibu Hamil Putus Sekolah
- Buta Huruf
- Bantuan Sosial
- Kustom sesuai kebutuhan wilayah



Administrasi

- Layanan Administrasi persuratan
- Surat keterangan meninggal dunia
 - Surat keterangan tidak mampu
- Surat keterangan ahli waris
 - Surat keterangan usaha
 - Kustom sesuai kebutuhan instansi

Pemerintahan

- Kas umum, kas masuk dan keluar
- Inventaris pemerintah desa/kelurahan
 - Tanah warga (pertanahan)

Cendrawasih

Desa
Ngarai Bamisa

Periode
2017

Jenis APBDes
Awal

PENDAPATAN BELANJA PEMBIAY	raan
I. Pendapatan Asli Desa	II. Pendapatan Transfer
Hasil Aset	Dana Desa
Rp 0,00	Rp 942.523.000,00
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong	Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Rp 0,00	Rp 1.416.568.093,00
Lain - Iain	Alokasi Dana Desa
Rp 0,00	Rp 0,00
Total Pendepatan Asii Desa	Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten
Rp 0,00	Rp 180.000.000,00
	Bentuan keuangan dari APBD Provinsi
	Rp 0,00
	Total Pendapatan Transfer
	Rp 2.539.091.093,00

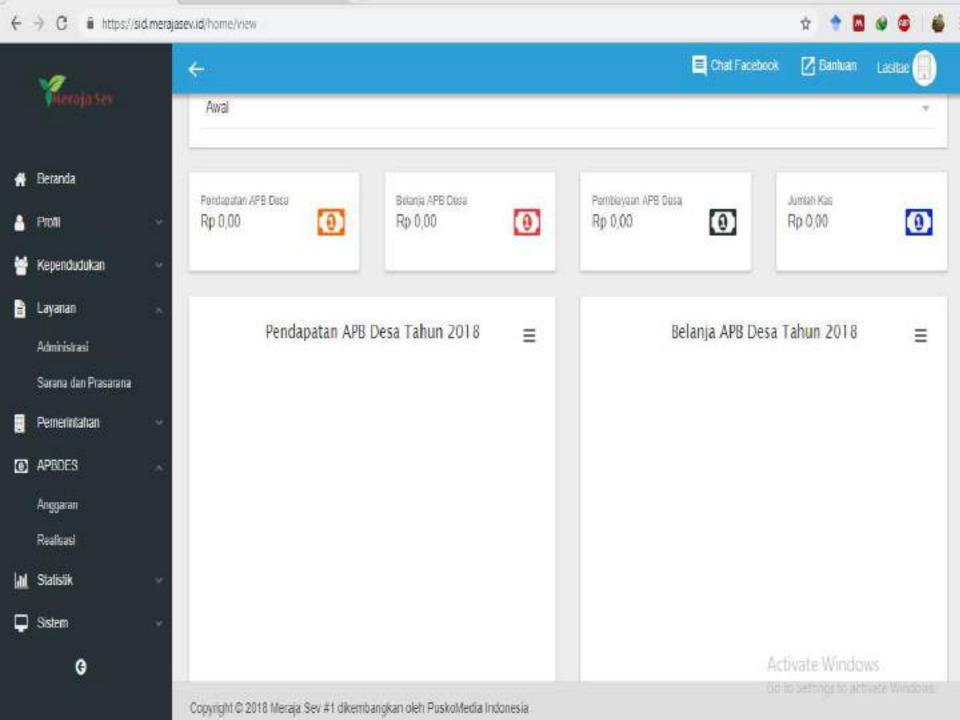
Data APB Desa

- Data anggaran APB Desa,
- Pendapatan
- Belanja
- Pembiayaan
- Laporan realisasi APB Desa;
- Pendapatan
- Belanja

Statistik Pintar

- Statistik Lahan
- Statistik Kependudukan
 - Statistik Pendidikan
 - Statistik Kesehatan
 - Statistik Administrasi
- Statistik Sarana & Prasarana
 - Statistik APB Desa

Pembiavaan



panda

Kepala Keluarga 7904



27764



Jumlah Laki-laki 14274



1344





Status Perkawinan



Statistik Pekerjaan

Jumlah Total Penduduk : 27764

Pelajar/ Mahasiswa Mengurus Rumah Tan... Belum/ Tidak Bekerja

4 529 (

Aspek Teknis

- Cetak data persuratan
- Download/ print data statistik
- Ekspor data format spreadsheet/ image
- Pengaturan data kustom
- Pengaturan pencadangan data otomatis
- Preferensi kemampuan akses pengguna tingkat kabupaten/ desa/ operator









Panda Mobile

- Permohonan layanan secara online
- Berita desa/kelurahan,
 Kecamatan, dan Kabupaten
- Profil desa/kelurahan,
 Kecamatan, dan Kabupaten
- Pendataan penduduk (sensus)

Dasar Hukum Pelaksanaan SID:

Panda membantu implementasi bagian Ketiga UU No.6 Tentang Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan



Terima Kasih Sujudku sesempurnanya, S3.UMI 2018 The End * * *

http://www.merajamedia.com/





Kewirausahaan Berbasis Website

Kata kewirausahaan dalam bahasa Inggris disebut dengan entrepreneurship. Kata entrepreneurship tersebut diadaptasi dari bahasa Perancis, entreprende yang mengandung arti petualang, pencipta, dan pengelola usaha.

Alfepaw 2019

Pengertian Website

Semakin berkembangnya teknologi di Indonesia, sudah banyak media yang digunakan dalam penyampaian informasi di internet salah satunya adalah website. Pengertian website adalah kumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berisikan kumpulan informasi dan dapat diakses melalui browser dan juga jaringan internet. ha.

Contoh Web Kewirausahaan



Tokupadra - Online Integralia

电影电影



Shopee No J the



Lacradie - Uninst 1: Valuale Medite

电压 电压



Sykalopik - Jun III. Philosopit tim

20 10 10 10 10



DEX - Just Bisk C-



20 et - Selarga U.S.

20 10 10 10



Sale Stock Toro III. Spir. Stock

化 化 化 化



Was Shippen



AREADAMA, Situation

4000



Toopeda Nele-



Akides - Orini Akides

....



Biddi com Belle (i albicos

4 4 4 4

Contoh Web Kewirausahaan





Liam Condon

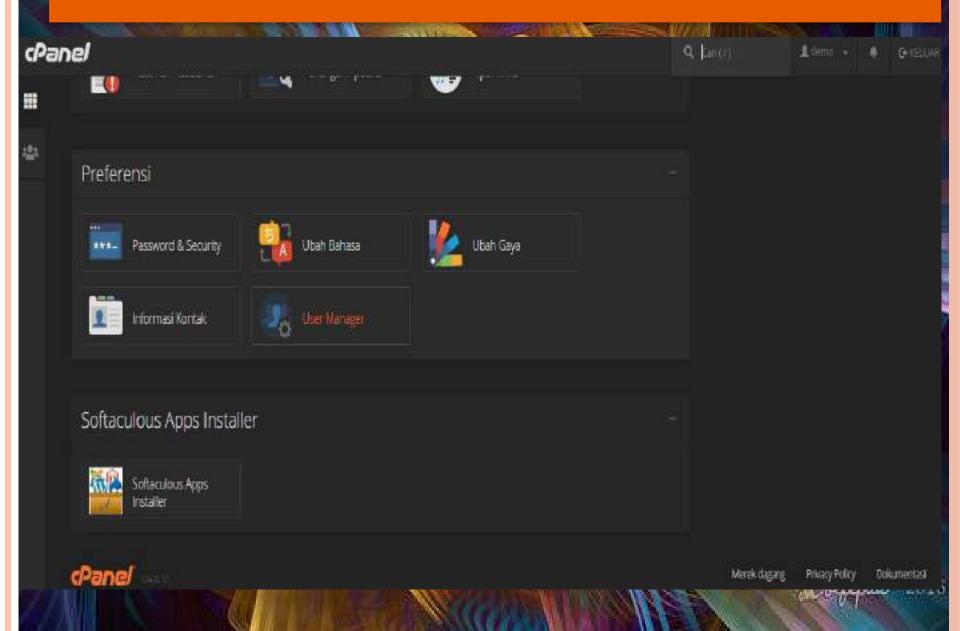
An Important Day for the Future of Agriculture

READ MORE

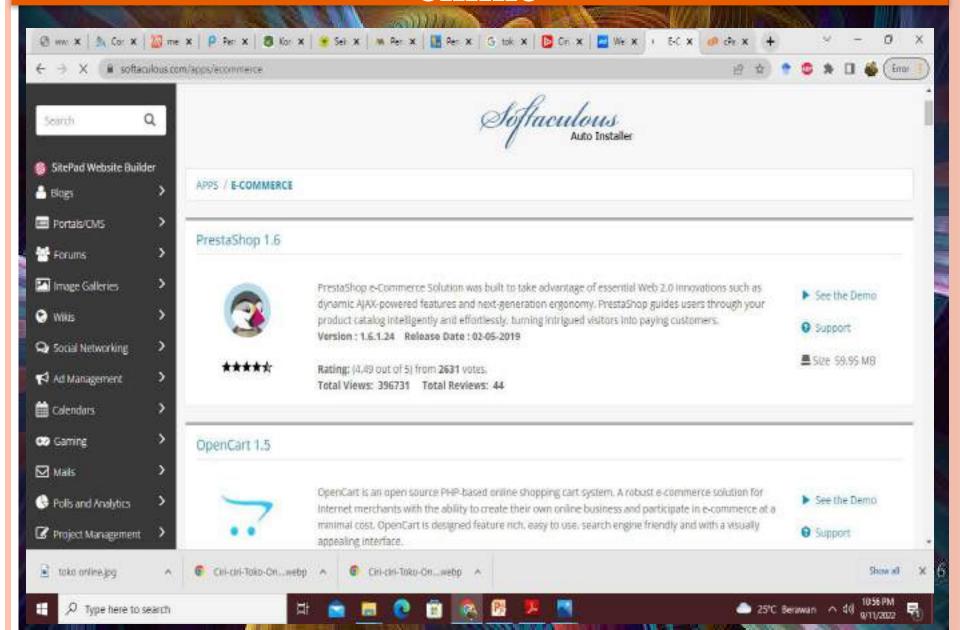




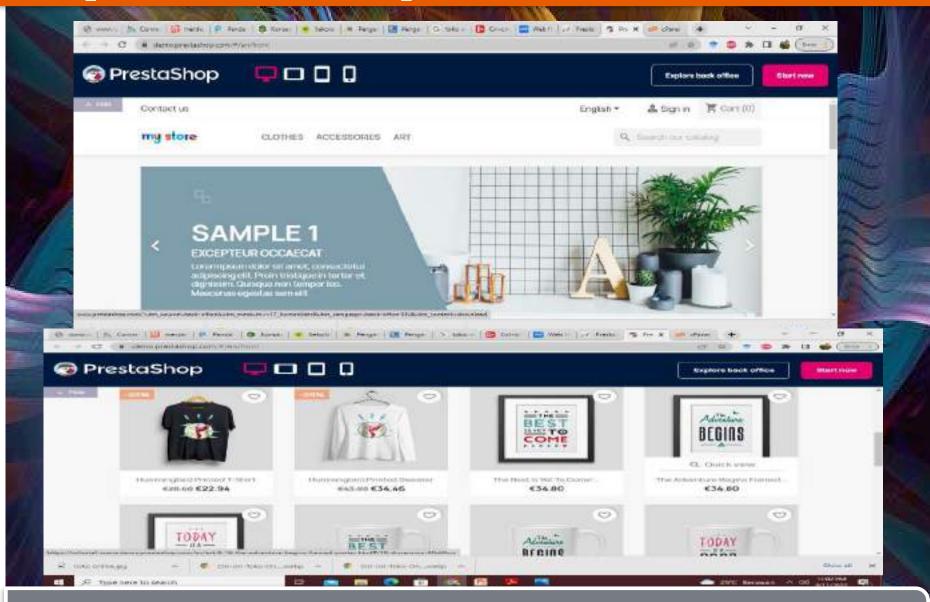
HOSTING: C-Panel-Softaculous



Apl untuk membuat profil usaha dan toko online



Apl untuk membuat profil usaha dan toko online



Dalam apl ini memungkinkan untuk menampilkan profil usaha,jenis produk,harga,layanan pengiriman barang,pilihan bank untuk transaksi (tf)

Apl untuk membuat profil usaha dan toko online



